

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil peneliti dengan melalui pengumpulan data sampai dengan pembahasan mengenai implementasi program kota tanpa kumuh di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Implementasi program kota tanpa kumuh di Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, dapat dilihat dari teori Van Metter dan Van Horn yang mana masih belum berjalan secara optimal dan masih terdapat kendala dan hambatan, yaitu :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yaitu masih terdapat ketidak sesuain dengan wilayah kumuh yang ada di Kecamatan Citamiang akan tetapi pemerintah telah memprioritaskan wilayah yang layak mendapatkan program Kotaku dan di sah kan melalui SK.
2. Sumber-sumber kebijakan yaitu masih kurangnya dari fasilitas fisik dan sumber daya alam sehingga program Kotaku belum berjalan dengan optimal;
3. Komunikasi antar organisasi yaitu dalam hal sosialisasi mengenai program Kotaku yang belum dilaksanakan secara merata kepada masyarakat Kecamatan Citamiang, sehingga menimbulkan beberapa miskomunikasi;

4. Karakteristik Badan-badan pelaksana yaitu adanya organisasi formal dan organisasi informal terkait dengan pelaksanaan pembangunan program Kotaku. Organisasi formal terkait instansi dinas, fasilitator kecamatan dan BKM kelurahan dan selanjutnya terkait organisasi informal dalam pelaksanaan pembangunan program Kotaku yaitu adanya organisasi informal yang berasal dari masyarakat setempat, akan tetapi tidak semua kelurahan memiliki organisasi informal;
 5. Kecenderungan pelaksana yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat yang dilibatkan dalam program Kotaku yaitu anggota BKM yang masih belum memahami tata cara penyusunan proposal dan RAB;
 6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik yaitu dalam segi ekonomi kurangnya minat dari masyarakat sekitar karena mengharapkan upah, dalam segi sosial dikarenakan masyarakat setempat lebih memilih kegiatan kesehariannya sehingga sulit mengikuti pelaksanaan program Kotaku, sedangkan segi politik adanya dukungan dari pihak pemerintah.
- b. Faktor pendukung dan penghambat
1. Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah (1) adanya sumber hukum yang jelas yaitu Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman; dan (2) SK Walikota No 60 yang menjadi komitmen bagi pelaksana program Kotaku.

2. Faktor penghambat yang menjadi kendala yaitu: (1) masih kurangnya sumber daya alam; (2) terjadinya miskomunikasi karena kurangnya sosialisasi mengenai program Kotaku; (3) kelompok perawatan dan pemanfaatan yang belum menyeluruh ada disetiap kelurahan (4) kurangnya pemahaman dari BKM mengenai pembuatan proposal dan RAB untuk program Kotaku; (5) kurangnya dukungan dari masyarakat setempat sekitar Kecamatan Citamiang.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dari hasil penelitian ini dengan saran teoritis dan saran praktis, dengan harapan besar semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program Kotaku khususnya di Kecamatan Citamiang antara lain:

5.2.1 Saran Praktis

Saran praktis ini berdasarkan dari masing-masing dimensi:

1. Ukuran Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Untuk mencapai kebijakan dalam pelaksanaan Kotaku supaya terlaksana secara merata, maka pihak BKM harus melakukan baseline kembali kepada wilayah-wilayah yang kumuh sehingga menjadi prioritas pemerintah.

2. Sumber-sumber Kebijakan:

- a. Harus ada penambahan pegawai Dinas untuk mengelola program Kotaku supaya lebih bisa terkontrol dengan baik.
- b. Fasilitator dan BKM harus melengkapi sumber daya fasilitasnya

3. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana;

- a. Untuk meningkatkan komunikasi yang baik yaitu dengan mengadakan sosialisasi agar tidak terjadi miskomunikasi antar masyarakat dan pelaksana Kotaku.
- b. Dalam meningkatkan komunikasi BKM dan masyarakat harus bekerjasama dengan pihak Kecamatan agar pihak Kecamatan dapat membantu mengadakan sosialisasi.

4. Karakteristik Badan-badan pelaksana:

Seluruh kelurahan harus membentuk forum kelompok perawatan pemanfaatan untuk meningkatkan kembali kerja sama dalam merawat dan memanfaatkan hasil dari pembangunan program Kotaku.

5. Kecenderungan pelaksana

Meningkatkan kembali kegiatan kelompok belajar mengenai pembangunan Kotaku seperti penyusunan proposal dan RAB dengan langsung melaksanakan simulasi.

6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Untuk meningkatkan dukungan dari lingkungan ekonomi, sosial maupun politik, maka pihak Dinas harus lebih meningkatkan sosialisasi dan memberi pemahaman yang jelas kepada masyarakat agar masyarakat memberikan respon atau dukungan yang baik dan pengawasan secara langsung agar dapat melihat kondisi dilapangan yang sebenarnya.

5.2.2 Saran Teoritis

1. Adanya penelitian lanjut mengenai analisis kebijakan program Kotaku di Kota Sukabumi. Sehingga dapat diketahui lebih dalam dan rinci mengenai pelaksanaan program Kotaku di Kota Sukabumi.
2. Adanya penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap program Kotaku, sehingga dapat diketahui partisipasi apa yang dapat meningkatkan pembangunan dalam program Kotaku.